

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Sopian. 2014. *Substansi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan*. In Media: Bogor.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Agus Kasiyanto. 2018. *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisah. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press: Makassar.
- Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan Tanggungjawab Yayasan*. Kencana. Jakarta.
- A. Zainal Abidin Farid. 2018. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Chidir Ali. 2014. *Badan Hukum*. PT. Alumni: Bandung.
- Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.
- H. Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bayumedia Publishing: Malang.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana: Jakarta.
- J.E. Sahetapy. 1994. *Kejahatan Korporasi*. Eresco: Bandung.

- John Braihwaite. 1984. *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*. Routledge & Kegan Paul. London.
- Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Sinar Grafika: Jakarta.
- 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional (Buku Tiga)*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)* Cetakan Ketiga. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Muladi dan Diah Sulistiyani RS. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Alumni: Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung: Bandung.
- , 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana: Jakarta.
- M. Arief Amrullah. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi, Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Nico Adrianto. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Bayumedia Publishing: Malang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Purwosusilo. 2017. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Kencana: Jakarta.

- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- R. Ali Rido. 2012. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. PT. Alumni, Bandung.
- Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung.
- Shed Hussein Alatas. 1982. *Sosiologi Korupsi*. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2015. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti: Jakarta.
- William S. Laufer. 2006. *Corporate Bodies and Gulty Minds: The Failure of Corporate Criminal Liability*. The University of Chicago Press. Chicago.
- Yudi Kristiana. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta.
- Yusuf Shofie. 2011. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

## **JURNAL, ARTIKEL DAN KARYA ILMIAH**

Bram Meyer, Tessa van Roomen, Eelke Sikkema. 2014. *Corporate Criminal Liability for Corruption Offences and the Due Diligence Defence A Comparison of the Dutch and English Legal Frameworks*. Utrecht Law Review Volume 10: Utrecht.

Dewa Brata. 2016 *Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi*. Kompas. 18 Juli 2005 dalam buku Dr. Yudi Kristiana, S.H. M.Hum. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*: Jakarta.

*Laporan Tahunan KPK 2016*. 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.

LPSE Pusat. 2010. *E-Procurement di Indonesia : Pengadaan Barang Secara Elektronik*.

Jurnal LKPP. 2011. *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Volume 1 No. 1.

*Kebocoran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dalam [iprocwatch.org](http://iprocwatch.org)

*Keterbukaan Kontrak PJB di Indonesia* dalam [antikorupsi.org](http://antikorupsi.org)

Kejaksaan Agung RI. 2010. *Blue Print Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Terkait Pertanggungjawaban Korporasi*. Kejaksaan Agung. Jakarta

SifRizal Fahrudin. 2019. *Sanksi Restoratif pada Pemidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi. Universitas Hasanuddin: Makassar.

Russel Butarbutar. 2005. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi*. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas: Jakarta.

Tim Penyusun. 2009. *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jakarta.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

*Burgerlijk Wetboek (BW)*

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Kophandel*)

Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pidana oleh Korporasi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (Perja) Nomor : Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-purchasing*

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang dan Jasa